

ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DIWILAYAH RIAU DARATAN

Sri Endang Kornita dan Taryono

Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

This study aims to (i) determine the structure and source of investment in the area of Riau, (ii) determine the relationship between investment income Riau region (iii) determine and analyze the level of investment required for the development of the region Riau fore. This type of research is the development of research that aims to develop, expand, and dig deeper into the theory of investment and economic development in a region that is strongly associated with the field of development economics and regional economics

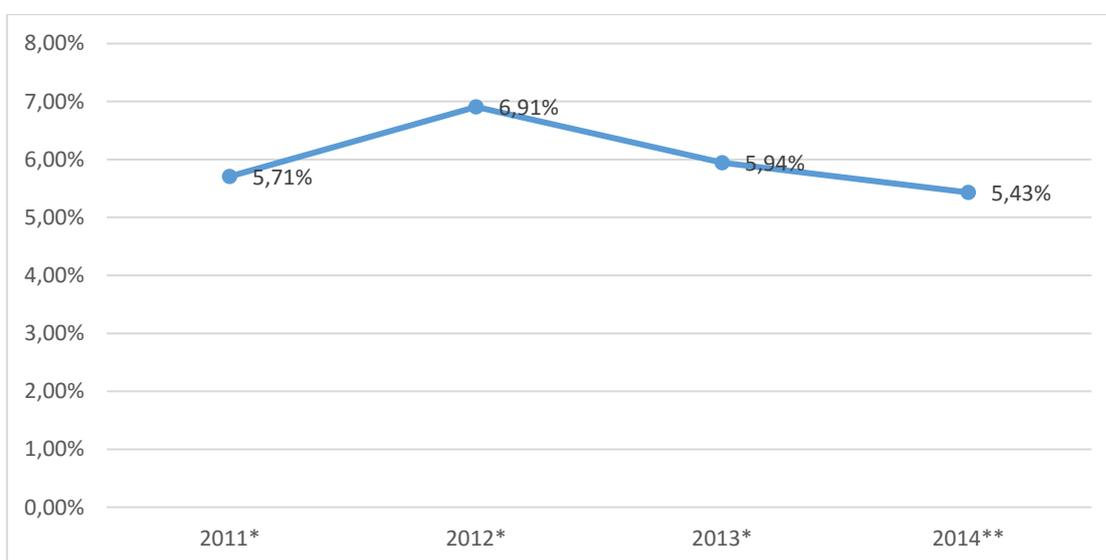
The results showed that the city of Pekanbaru has a significant role for the development of the investment needs in the area of Riau. Riau region that have more economic structure leads to secondary and tertiary sectors tend to have Capital Output Ratio (COR) and the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) is higher than the economic structure of the region is dominated by the primary sector. Then to be able to boost economic growth in the region of Riau Mainland every year an average of 6.03% during the years 2015-2020, the total investment is estimated at constant prices of Rp. 599,865.00 billion, at current prices is estimated at Rp. 901,005.43 billion.

Keywords : Investment, ICOR, and COR

I. PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan suatu wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya yang dilakukan antara lain dengan terus meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan serta menurunkan tingkat ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Daratan antara tahun 2011 sampai

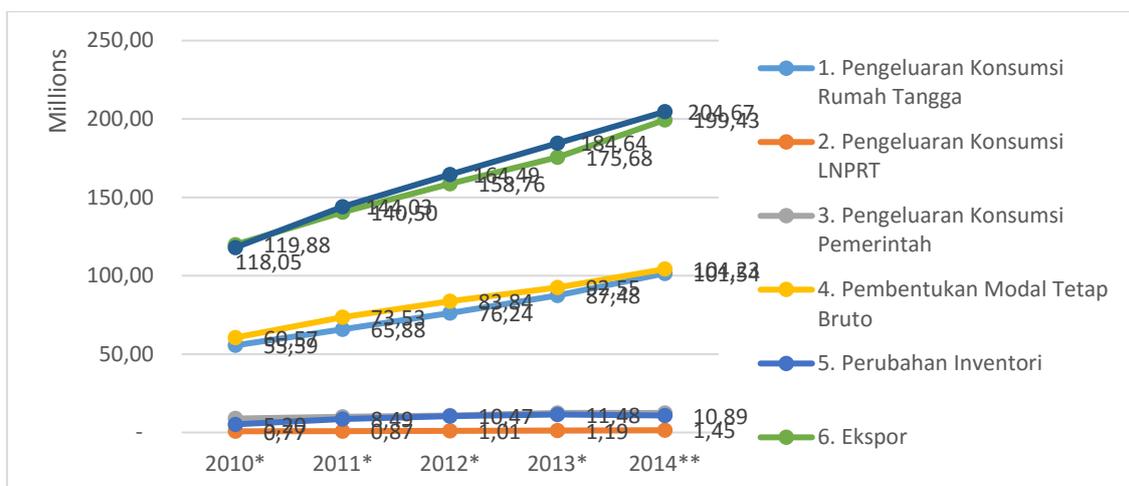
dengan tahun 2014 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2011 tumbuh sebesar 5,71% dan di tahun 2014 turun menjadi 5,43%. Selama periode tersebut pada tahun 2012 terjadi peningkatan pertumbuhan menjadi 6,91% namun setelah 2012 pertumbuhan ekonomi di wilayah Riau Daratan terus terkoreksi, dimana pada tahun 2013 turun menjadi sebesar 5,94%.



Gambar 1 : Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Riau Daratan Tahun 2011-2014 (Sumber : BPS Provinsi Riau,2015)

Dilihat dari sisi agregat expenditure, kontribusi terbesar terhadap pembentuk pendapatan wilayah Riau Daratan bersumber dari kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2010 ekspor wilayah Riau Daratan sebesar Rp. 119,88 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 199,43 triliun atau rata-rata setiap tahun ekspor tumbuh sebesar 13,57%. Pertumbuhan impor rata-rata setiap tahun sebesar 14,75% masih lebih tinggi dari ekspor. Sehingga nilai impor meningkat dari Rp. 118,05 triliun di tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 204,67 triliun. Selain, ekspor dan impor

pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Daratan juga didorong dari sisi konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, LNPRT, maupun pemerintah.



Gambar 2 : Agregat Expenditure (AE) Wilayah Riau Daratan Tahun 2011-2014 (Sumber : BPS Provinsi Riau,2015)

Pemenuhan kebutuhan konsumsi di Wilayah Riau Daratan terhadap barang dan jasa, bukan hanya dari barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan investasi di Wilayah Riau Daratan sendiri tapi juga disediakan dengan cara mengimpor barang dan jasa dari wilayah/negara lain. Peranan impor dalam perekonomian wilayah Riau Daratan meningkat dari 88,86 % pada tahun 2010 menjadi 90,82% pada tahun 2014. Peranan investasi dalam mendorong peningkatan produksi barang dan jasa di wilayah Riau Daratan masih relative terbatas. Pada tahun 2010 peranan investasi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 45,59% dan meningkat menjadi 46,25% di tahun 2014. Padahal multiplier investasi cenderung lebih besar dibandingkan dengan multiplier konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dibutuhkan upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Daratan yang saat ini cenderung menurun. Pemupukan investasi yang mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

wilayah Riau Daratan dari waktu ke waktu perlu direncanakan. Kebutuhan dana investasi dapat bersumber dari swasta/masyarakat maupun pemerintah. Bentuk investasi swasta seperti PMDN dan PMA, sedangkan investasi pemerintah seperti investasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menurunnya produksi dan harga minyak dunia sampai pada harga \$30/barel menyebabkan penerimaan pemerintah daerah di wilayah Riau Daratan dari minyak bumi turun. Akibatnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sulit menjadi terganggu.

Investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi pada wilayah Riau Daratan atas dasar harga berlaku selama periode 2010-2014 rata-rata setiap tahun sebesar 14,12% dan pada periode yang sama rata-rata investasi tumbuh sebesar 14,53%. Pertumbuhan investasi di wilayah Riau Daratan yang terus

terkoreksi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga ikut terkoreksi. Pada tahun 2011 investasi tumbuh sebesar 13,43% dan ekonomi tumbuh sebesar 12,10%. Tahun 2014 pertumbuhan investasi terkoreksi menjadi sebesar 2,31% dan pertumbuhan ekonomi wilayah Daratan juga ikut terkoreksi menjadi sebesar 3,32%. Perubahan peran investasi yang diikuti laju pertumbuhan investasi yang terus menurun menyebabkan kontribusi investasi terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Daratan juga ikut terkoreksi.

Sumber utama untuk investasi merupakan tabungan masyarakat. Tingkat kecenderungan menabung (MPS) yang terus meningkat merupakan modal utama dalam meningkatkan jumlah tabungan. Kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat, keduanya memiliki korelasi yang positif. Penelitian Taryono dan Ekwarso (2012) menunjukkan hasil perhitungan indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat pada beberapa daerah di wilayah Riau Daratan ketimpangannya dalam kategori sedang. Ketimpangan yang sedang tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecenderungan menabung sebagai sumber peningkatan investasi.

Daerah pada wilayah Riau Daratan pada umumnya merupakan daerah penghasil migas. Penerimaan pemerintah daerah yang relative besar dari minyak bumi telah menjadikan kapasitas fiskal daerah-daerah di wilayah Riau Daratan semakin besar. Sehingga kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan (investasi) dalam penyediaan barang public turut meningkat. Penelitian Taryono dan

Ekwarso (2012) menemukan bahwa rata-rata belanja langsung antara kabupaten/kota penghasil migas dan bukan penghasil migas terdapat perbedaan yang signifikan. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Besarnya belanja langsung pada wilayah Riau Daratan diharapkan berkorelasi positif dengan penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung berkembangnya kegiatan investasi. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama, mengingat saat ini penerimaan dari migas mulai mengalami penurunan seiring penurunan produksi dan harga minyak dunia. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya tingkat pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang public. Selanjutnya, penyediaan barang public yang tidak sebanding dengan kapasitas perekonomian dapat menghambat tumbuhnya kegiatan investasi di wilayah Riau Daratan. Kondisi infrastruktur jalan merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam memutuskan untuk berinvestasi. Taryono dan Ekwarso (2013) menyebutkan bahwa kondisi jalan di Provinsi Riau sebesar 11,77% dalam kondisi yang tidak mantap, dimana dari kondisi tersebut sebesar 62,39% dalam kondisi rusak ringan dan sisanya sebesar 37,61% rusak berat.

Perencanaan investasi suatu wilayah menjadi penting untuk dilakukan guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Penduduk wilayah Riau Daratan yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan wilayah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pertumbuhan

penduduk maka dapat menimbulkan permasalahan penurunan kesejahteraan dan pengangguran meningkat. Salah satu upaya yang terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan terus meningkatkan kegiatan investasi. Tersedianya informasi kebutuhan investasi suatu wilayah akan membantu mempermudah pengalokasian sumberdaya ekonomi menjadi lebih efisien dan efektif. Karena akan mengarahkan seluruh stakeholders pada arah dan persepsi yang sama tentang pengembangan investasi wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kebutuhan investasi di wilayah Riau Daratan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Investasi

Investasi merupakan tambahan terhadap stok kapital. Pengertian kapital secara fisik adalah seluruh barang modal yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, bangunan, kendaraan dan peralatan serta lainnya. Kapital adalah harta tetap (*fixed assets*) suatu badan usaha. Secara umum kapital sering disebut sebagai *Gross Capital Stocks* merupakan akumulasi/penumpukan pembentukan modal bruto dari tahun ke tahun yang digunakan untuk menghasilkan produk baru. Investasi juga identik dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan besarnya investasi fisik (*real investment*) yang direalisasikan di suatu negara/wilayah pada suatu waktu tertentu (*physical domestic investment*). Disebut PMTB karena di dalamnya tidak termasuk perubahan stok (*inventory*). (BPS dan Bappeda Situbondo, 2012)

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Namun untuk merangsang investasi dibutuhkan agenda- agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Agenda-agenda dimaksud, antara lain: (i) merumuskan kebijakan investasi; (ii) memperbaiki peraturan dan regulasi; dan (iii) memperbaiki dukungan dan pelayanan birokrasi (*one-roof system atau one-stop shop*); (iv) mengembangkan promosi daerah; (v) mengembangkan kemitraan (*partnership*); (vi) mengembangkan regional management; (vii) mengembangkan business networking; dan (viii) mempertajam strategi belanja publik (Salim, 2010).

Kegiatan investasi diharapkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kehadirannya mampu berperan sebagai motor penggerak dan sekaligus menjadi pendorong percepatan (akselerasi) pembangunan secara luas. Pengalaman negara-negara lain yang perekonomiannya tumbuh dengan pesat menunjukkan bahwa kegiatan investasi sangat signifikan mempengaruhi peningkatan ekspor, devisa negara, pendapatan negara maupun daerah, penyerapan tenaga kerja serta alih teknologi yang kesemuanya itu bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, walaupun terjadi akselerasi investasi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun terdapat berbagai kendala yang menyebabkan investasi (PMA maupun PMDN) dari tahun ke tahun tidak stabil (berfluktuasi). (Sasana, 2008).

Salah satu indikator yang umum digunakan dalam kegiatan evaluasi dan

perencanaan terutama yang berkaitan dengan investasi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR merupakan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya inefficiency dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negative atau nilai relative besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relative kecil. (BPS dan Bappeda DIY, 2014)

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya harus disadari bahwa perubahan nilai pendapatan yang nasional yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Terdapat 3 pendekatan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. (Prishardoyo, 2008). Selanjutnya agar terjadi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan menurut Soesilowati (2008) berbagai perubahan dalam pertumbuhan penduduk perlu menjadi pertimbangan, karena jika suatu kenaikan pendapatan nyata yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka akan terjadi kemunduran

ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Meningkatnya konsumsi akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengalami kenaikan. Demikian juga dengan perkembangan investasi yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun naik dan sebaliknya. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah juga turut memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Shandra, 2012). Dari ketiga faktor tersebut konsumsi masih memegang peranan besar terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan investasi swasta peranannya masih relative lebih besar daripada investasi pemerintah.

Tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja melainkan juga harus berkualitas. Dengan demikian, sasaran dan target-target pembangunan menjadi tidak hanya sekedar untuk peningkatan pendapatan, melainkan juga harus mampu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa faktor pendorong utama pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas antara lain investasi *human capital* yang cukup dan berkelanjutan serta penguasaan penggunaan teknologi. Selain itu, harus ada kesinergian antara peran dan potensi modal sosial yang dimiliki. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah diperoleh hasil pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, adanya transformasi dari masyarakat yang terbelenggu dalam keterbelakangan

(*vicious circle*) menjadi mampu menuju masyarakat yang “lebih maju”. (Prasetyo, 2008).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, dan perusahaan semakin banyak. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. (Barika, 2012).

C. Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan disuatu daerah bisa mempunyai konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Suatu kebijakan publik mestinya lebih banyak diarahkan pada upaya pencapaian utilitas tertinggi dari masyarakat. Pada pelaksanaannya banyak sekali yang menjadi hambatan antara lain anggaran yang terbatas. Penerimaan suatu daerah malah seringkali tidak dapat menutup pos pengeluaran sekalipun belanja rutin.

Metode keuangan yang digunakan mempengaruhi variabel ekonomi dan politik (Sebayang, 2008) adalah sebagai berikut:

- a. Keseimbangan politik, jumlah keseimbangan barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan pemerintah tergantung pada distribusi pajak per unit dari barang-barang dan jasa-jasa, karena pembagian pajak warga negara mempengaruhi pilihan mereka.
- b. Keseimbangan pasar keseluruhan dan efisiensi dimana sumber daya seperti tenaga kerja swasta. Metode ini dapat mengganggu harga barang-barang dan jasa-jasa sebagai cara untuk men- cegah pasar persaingan

dari pencapaian efisiensi.

- c. Distribusi pendapatan, skema keuangan alternatif yang mempengaruhi distribusi pendapatan melalui penurunan pendapatan yang dikeluarkan seseorang untuk mengkonsumsi barang dan jasa swasta dengan mempengaruhi harga dan jumlah barang-barang dan jasa-jasa di pasar. Kenyataannya, banyak warga negara mengajurkan penggunaan metode khusus keuangan pemerintah yang tepat untuk tujuan redistribusi pendapatan.
- d. Kesulitan ini bertambah ketika pemerintah daerah berhadapan dengan perubahan kebijakan. Tidak dapat dipungkiri kemudian kekuatan kompromi politik kemudian menentukan arah kebijakan. Salah satu imbas yang dirasakan daerah adalah adanya perubahan perundang-undangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Analisis Kebutuhan Investasi di Wilayah Riau Daratan adalah meliputi seluruh wilayah Riau Daratan. Pemahaman wilayah Riau Daratan dalam penelitian ini adalah daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Riau yang tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang termasuk kedalam kategori wilayah Riau Daratan terdiri dari 5 (lima) daerah yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian Analisis Kebutuhan Investasi

di Wilayah Daratan sebagai data utamanya merupakan data sekunder yang dipublikasikan oleh instansi/ lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Jenis data yang banyak dibutuhkan untuk analisis ini adalah data makro, seperti dapat Produk Domestik Regional Bruto, dokumen rencana

pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah, dan dokumen tentang pengeluaran pemerintah daerah terutama yang terkait dengan belanja modal. Terkait dengan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

| Data | Sumber Data |
|---|---------------------------|
| 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Wilayah Riau Daratan Menurut Lapangan Usaha (ADHB dan ADHK) | BPS |
| 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Wilayah Riau Daratan Menurut Pengeluaran (ADHB dan ADHK) | BPS |
| 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten/Kota Wilayah Riau Daratan | Pemda Kabupaten/Kota |
| 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Wilayah Riau Daratan | Pemda Kabupaten/Kota |
| 5. Kabupaten/Kota Dalam Angka | BPS |
| 6. Statistik Keuangan Daerah | BPS, Pemda Kabupaten/Kota |
| 7. Statistik Industri Besar dan Sedang | BPS |
| 8. Direktori Perusahaan Kontruksi | BPS |
| 9. Statistik Kesejahteraan Rakyat | BPS |

C. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mendatangi langsung pihak-pihak, lembaga/instansi yang mempublikasikan data tersebut. Sebelum proses pengumpulan data dilakukan terlebih dahulu peneliti mengurus perizinan untuk penelitian. Kemudian untuk melihat perkembangan kegiatan investasi di Wilayah Riau Daratan dilakukan pengamatan langsung ke lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sangat terkait dengan bidang ilmu ekonomi pembangunan dan ekonomi

regional. Secara teoritis hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat, (1939) dan Sir Roy Harrod, seorang ekonom Inggris, (1947), mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Namun karena kedua teori tersebut banyak kesamaannya, maka kemudian teori tersebut lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas terpasang (capital) dengan pertumbuhan ekonomi (output).

Besarnya investasi yang terjadi di suatu wilayah pada satu tahun tertentu

dapat tercermin dari nilai Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB). Namun demikian data tersebut hanya disajikan dalam bentuk agregat, sedangkan besaran PMTB menurut sektor ekonomi tidak tersajikan. Oleh karena itu, dalam

menganalisis struktur investasi di wilayah Riau Daratan perlu terlebih dahulu dihitung besarnya investasi setiap sector ekonomi dengan formulasi sebagai berikut :

$$PMTB_{sektor\ i} = \left\{ \left[\frac{PMTB_{Total}}{\Delta Y} \right] \times g \times \Delta Y_i \right\} / g_i$$

Dimana,

PMTB sector i = Besarnya investasi pada sector i

PMTB total = Nilai investasi total suatu wilayah

ΔY = Pertambahan Produk Domestik Regional Bruto

ΔY_i = Pertambahan Produk Domestik Regional Bruto Sektor i

g = Pertumbuhan ekonomi

g_i = Pertumbuhan ekonomi sector i

Koefisien yang menggambarkan hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi ini biasa disebut *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan

membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Selanjutnya untuk menganalisis hubungan antara investasi dengan pendapatan di wilayah Riau Daratan digunakan formulasi perhitungan ICOR. Berdasarkan teori formulasi ICOR adalah sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Dimana,

ΔK = Penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = Pertambahan output

Namun demikian, pertambahan output pada tahun tertentu tidaklah hanya disebabkan oleh penambahan barang modal baru melainkan juga adanya akumulasi capital yang terjadi. Oleh karena itu, data yang digunakan untuk

menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

Dimana,

I = Investasi

ΔY = Pertambahan output

Agar memperoleh satu nilai ICOR yang dapat mewakili suatu periode waktu, maka digunakan penghitungan dengan rata-rata sederhana. Nilai koefisien ICOR dapat positif atau negative. Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif sehingga relatif kurang efisien. Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya.

Melalui kegiatan investasi diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan, berarti terjadi peningkatan output yang akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Output suatu wilayah terjadi peningkatan pada kenyataannya bukan hanya disebabkan oleh investasi tapi juga faktor lainnya seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan entrepreneurship. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tingkat investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada masa datang, maka perlu dilakukan perencanaan besarnya kebutuhan investasinya. Formulasi yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan investasi apabila angka ICOR maupun COR telah diketahui adalah sebagai berikut :

$$I_{tn} = ICOR \times \Delta Y_n \text{ atau } I_{tn} = COR \times Y_n$$

Dimana,

I_{tn} = Kebutuhan Investasi tahun n

ΔY_n = Pertambahan output tahun n

ICOR = Incremental Capital Output Ratio

COR = Capital Output Ratio

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Sumber Investasi

Fenomena yang umum terjadi di negara berkembang dan Indonesia khususnya adalah terjadinya kekurangan investasi dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan. Tingkat investasi di wilayah Riau Daratan selama tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan. Di wilayah Riau Daratan dari nilai investasi (PMTDB) pada tahun 2010 sebesar Rp. 60.567,11 milyar dapat menghasilkan nilai Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga harga konstan sebesar Rp. 132.852,31 milyar atau ratio investasi terhadap PDRB atas dasar harga konstan sebesar 38,87%. Dilihat menurut daerah kabupaten/kota di Wilayah Riau Daratan, Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan tingkat investasi tertinggi, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 34.670,39 milyar meningkat menjadi sebesar Rp. 45.938,23 milyar. Sedangkan daerah kabupaten/kota dengan tingkat investasi terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.100,57 milyar dan menjadi sebesar Rp. 4.071,80 pada tahun 2014.

Tabel 5 : Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Wilayah Riau Daratan Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

| Kabupaten/Kota | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014** |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kuantan Singingi | 5.126.194,05 | 6.118.981,53 | 6.693.227,02 | 7.204.245,26 | 7.375.722,51 |
| Indragiri Hulu | 6.542.793,03 | 7.520.824,68 | 8.088.223,62 | 8.519.907,12 | 8.760.058,41 |
| Kampar | 11.127.157,44 | 12.736.927,64 | 13.934.111,96 | 14.625.277,04 | 14.893.621,58 |
| Rokan Hulu | 3.100.573,13 | 3.559.964,39 | 3.872.256,42 | 3.999.557,16 | 4.071.795,74 |
| Pekanbaru | 34.670.391,38 | 38.765.575,70 | 42.294.438,27 | 44.862.323,38 | 45.938.233,11 |
| PMTDB Riau Daratan | 60.567.109,03 | 68.702.273,94 | 74.882.257,30 | 79.211.309,96 | 81.039.431,35 |

Sumber : BPS, 2016

Kenaikan harga-harga barang modal untuk berinvestasi dalam suatu wilayah yang cenderung lebih tinggi mengakibatkan perkembangan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) atas dasar harga berlaku jauh lebih tinggi dari harga konstan. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) atas dasar harga berlaku di wilayah Riau Daratan, pada tahun 2010 nilainya sama dengan PMTDB atas dasar harga konstan yaitu Rp. 60.567,11 milyar dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp. 104.228,91 milyar atau indeks

implisitnya sebesar 127,50%. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah dengan perkembangan indeks implisit tertinggi di wilayah Riau Daratan yaitu 132,95% pada tahun 2014 yang diikuti Kota Pekanbaru sebesar 129,21%. Sehingga pada tahun 2014 besarnya PMTDB Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 9.805,94 milyar dan Kota Pekanbaru sebesar Rp. 59.357,51 milyar. Sedangkan daerah dengan peningkatan indeks implisit terendah di wilayah Riau Daratan adalah Kabupaten Rokan Hulu yaitu 120,09%.

Tabel 6 : Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) Atas Dasar Harga Berlaku di Wilayah Riau Daratan Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

| Kabupaten/Kota | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014** |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Kuantan Singingi | 5.126.194,05 | 6.487.368,85 | 7.516.667,11 | 8.448.997,47 | 9.805.937,60 |
| Indragiri Hulu | 6.542.793,03 | 8.156.164,38 | 9.181.708,92 | 9.981.070,35 | 11.202.263,59 |
| Kampar | 11.127.157,44 | 13.437.774,78 | 15.399.226,49 | 16.935.249,52 | 18.973.215,13 |
| Rokan Hulu | 3.100.573,13 | 3.696.321,65 | 4.161.382,92 | 4.495.542,25 | 4.889.984,51 |
| Pekanbaru | 34.670.391,38 | 41.751.428,27 | 47.576.236,18 | 52.692.065,86 | 59.357.510,37 |
| PMTDB Riau Daratan | 60.567.109,03 | 73.529.057,94 | 83.835.221,61 | 92.552.925,44 | 104.228.911,20 |

Sumber : BPS, 2016

B. Hubungan Investasi dan Pendapatan Wilayah

Kinerja investasi suatu wilayah dapat tercermin dari *Capital Output Ratio* (COR) dan *Incremental Output Ratio* (ICOR). Perkembangan ketersediaan investasi suatu wilayah dapat diukur dari *Capital Output Ratio* (COR) yang merupakan ratio antara investasi yang terwujud dengan pendapatan suatu wilayah atau PDRB. Sedangkan besarnya kemampuan investasi suatu wilayah dalam meningkatkan setiap peningkatan

pendapatan wilayah dapat diukur dari *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Apabila diasumsikan COR konstan, maka besarnya pendapatan suatu wilayah pada tahun tertentu akan ditentukan oleh besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan besarnya kemampuan setiap rupiah investasi untuk meningkatkan setiap rupiah pendapatan wilayah (PDRB) atau ICOR. Dengan demikian, apabila pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat maka akan menghasilkan nilai ICOR yang cenderung menurun.

Tabel 7 : COR Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Wilayah Riau Daratan Tahun 2010-2014

| Kabupaten/Kota | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014** | Rata-rata |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Kuantan Singingi | 30,85% | 35,36% | 36,51% | 37,26% | 36,21% | 35,36% |
| Indragiri Hulu | 31,48% | 34,38% | 34,12% | 33,83% | 32,94% | 33,38% |
| Kampar | 29,42% | 32,35% | 33,44% | 33,03% | 32,59% | 32,23% |
| Rokan Hulu | 19,46% | 20,91% | 21,43% | 20,90% | 19,92% | 20,53% |
| Pekanbaru | 83,14% | 86,44% | 87,47% | 87,75% | 84,15% | 85,83% |
| Riau Daratan | 38,87% | 41,89% | 42,59% | 42,56% | 41,16% | 41,47% |

Sumber : BPS, 2016

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan *Incremental Capital Output Ratio* (COR) di wilayah Riau Daratan memiliki hubungan yang negatif. Dilihat dari tabel 5 angka COR di wilayah Riau Daratan selama periode 2010-2014 atas dasar harga konstan

rata-rata setiap tahunnya sebesar 41,47%. Pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Daratan yang cenderung menurun, dimana pada tahun 2011 sebesar 5,71% turun menjadi sebesar 5,43% pada tahun 2014 diikuti dengan peningkatan ICOR dari sebesar 6,88 pada tahun 2011

meningkat menjadi sebesar 7,86 pada tahun 2014 atau rata-rata setiap tahun sebesar 6,86. Secara umum ICOR daerah-daerah di wilayah Riau Daratan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010 angkanya mengalami peningkatan. Ini menggambarkan bahwa

pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah di wilayah Daratan juga sedang mengalami perlambatan. Investasi disektor sekunder yang pada umumnya tingkat pengembaliannya relatif lebih menyebabkan nilai ICOR tanpa time lag menjadi lebih tinggi.

Tabel 8 : ICOR Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Wilayah Riau Daratan Tahun 2011-2014

| Kabupaten/Kota | 2011* | 2012* | 2013* | 2014** | Rata-rata |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Kuantan Singingi | 7,40 | 5,96 | 6,69 | 6,97 | 6,70 |
| Indragiri Hulu | 6,00 | 4,10 | 5,49 | 6,02 | 5,28 |
| Kampar | 7,15 | 5,56 | 5,35 | 10,28 | 6,66 |
| Rokan Hulu | 2,83 | 3,42 | 3,61 | 3,08 | 3,22 |
| Pekanbaru | 11,03 | 11,06 | 15,26 | 12,93 | 12,46 |
| Riau Daratan | 6,88 | 6,02 | 7,28 | 7,86 | 6,86 |

Sumber : BPS, 2016

Ratio investasi dengan pendapatan suatu wilayah (PDRB) atas dasar harga berlaku di wilayah Riau Daratan selama periode 2010-2014 rata-rata setiap tahunnya sebesar 46,76%. Setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 angka COR di wilayah Riau Daratan berfluktuasi, dimana pada tahun 2010 sebesar 45,59% dan meningkat menjadi sebesar 47,33% pada tahun 2011 dan kembali meningkat menjadi sebesar 47,45% pada tahun 2012. Angka COR tahun 2013 cenderung lebih rendah

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 47,16% dan penurunan tersebut terus berlanjut sampai tahun 2014, dimana COR wilayah Riau Daratan turun menjadi sebesar 46,25%. Dilihat menurut daerah kabupaten/kota di wilayah Riau Daratan angka COR tertinggi adalah Kota Pekanbaru rata-rata sebesar 84,10% dan terendah Kabupaten Rokan Hulu rata-rata sebesar 20,15%. Perkembangan angka COR setiap daerah di wilayah Riau Daratan selama tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi.

Tabel 9 : COR Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku di Wilayah Riau Daratan Tahun 2010-2014

| Kabupaten/Kota | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014** | Rata-rata |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Kuantan Singingi | 30,85% | 35,73% | 37,67% | 38,89% | 40,89% | 36,81% |
| Indragiri Hulu | 31,48% | 33,26% | 33,42% | 33,11% | 33,14% | 32,88% |
| Kampar | 29,42% | 28,97% | 28,74% | 27,79% | 27,92% | 28,57% |
| Rokan Hulu | 19,46% | 20,43% | 20,84% | 20,60% | 19,43% | 20,15% |
| Pekanbaru | 83,14% | 86,64% | 85,43% | 85,53% | 79,74% | 84,10% |
| PMTDB Riau Daratan | 45,59% | 47,33% | 47,45% | 47,16% | 46,25% | 46,76% |

Sumber : BPS, 2016

Kemampuan setiap tambahan rupiah investasi yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap tambahan pendapatan wilayah (PDRB) berdasarkan perkembangan harga-harga yang terjadi setiap tahunnya dapat tercermin dari angka ICOR atas dasar harga berlaku. Di wilayah Riau Daratan rata-rata untuk meningkatkan setiap tambahan pendapatan wilayah (PDRB) sebesar Rp. 1 milyar dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp. 3,4 milyar atau ICOR sebesar 3,3569. Angka ICOR tertinggi dilihat menurut daerah kabupaten/kota di wilayah Riau

Daratan adalah Kota Pekanbaru dengan perkembangan ICOR tahun 2011 sebesar 5,3427 dan meningkat menjadi sebesar 5,5669 ditahun 2012 dan meningkat menjadi 8,0478 ditahun 2013 serta lebih rendah dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2014 yaitu 4,1067. ICOR atas dasar harga berlaku terendah di wilayah Riau Daratan adalah Kabupaten Rokan Hulu yaitu 1,4337 ditahun 2011 dan terus meningkat hingga tahun 2013 menjadi sebesar 2,2379 dan turun menjadi sebesar 1,3471 pada tahun 2014.

Tabel 10 : ICOR Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku di Wilayah Riau Daratan Tahun 2011-2014

| Komponen Pengeluaran | 2011* | 2012* | 2013* | 2014** | Rata-rata |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Kuantan Singingi | 3,3229 | 3,6131 | 4,2436 | 3,7406 | 3,7430 |
| Indragiri Hulu | 1,7493 | 2,7662 | 3,4300 | 2,7295 | 2,6003 |
| Kampar | 1,2983 | 1,8686 | 2,0952 | 2,4106 | 1,8880 |
| Rokan Hulu | 1,4337 | 1,9725 | 2,2379 | 1,3471 | 1,6737 |
| Pekanbaru | 5,3427 | 5,5669 | 8,0478 | 4,1067 | 5,3981 |
| PMTDB Riau Daratan | 2,6912 | 3,4506 | 4,2841 | 3,1796 | 3,3569 |

Sumber : BPS, 2016

C. Kebutuhan Investasi

Di wilayah Riau Daratan selama tahun 2015-2020 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03% pertahun diperkirakan dibutuhkan total investasi atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp. 599.865,00 milyar. Total investasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan total pendapatan wilayah selama tahun 2015-2020 sebesar Rp. 1.214.302,31 milyar.

Laju pertumbuhan investasi selama periode tahun 2015-2016 diperkirakan setiap tahunnya rata-rata tumbuh sebesar 6,36%, maka

diperkirakan besarnya kebutuhan investasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 116.931,62 milyar. Peranan setiap daerah di wilayah Daratan pada tahun 2020 diperkirakan relatif masih sama dengan peranan setiap daerah pada tahun 2015. Pada tahun 2020 kebutuhan investasi di Kota Pekanbaru diperkirakan sebesar Rp. 69.361,74 milyar, Kabupaten Kampar sebesar Rp. 19.202,63 milyar, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 12.621,67 milyar, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 9.682,56 milyar dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 6.063,01 milyar.

Tabel 11 : Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Wilayah Riau Daratan Tahun 2015-2020

| Kabupaten/Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Kuantan Singingi | 7.506.816,02 | 7.842.716,79 | 8.223.011,23 | 8.652.533,46 | 9.136.886,84 | 9.682.562,29 |
| Indragiri Hulu | 9.275.187,15 | 9.734.913,39 | 10.285.732,64 | 10.939.889,78 | 11.712.411,85 | 12.621.667,74 |
| Kampar | 15.162.779,17 | 15.680.483,34 | 16.327.820,91 | 17.118.461,81 | 18.069.612,28 | 19.202.626,92 |
| Rokan Hulu | 4.440.124,66 | 4.704.575,69 | 4.995.910,02 | 5.317.107,58 | 5.671.537,83 | 6.063.014,79 |
| Pekanbaru | 49.540.024,99 | 52.528.641,18 | 55.942.361,86 | 59.838.651,68 | 64.285.189,01 | 69.361.743,76 |
| Riau Daratan | 85.924.931,98 | 90.491.330,39 | 95.774.836,65 | 101.866.644,31 | 108.875.637,81 | 116.931.615,50 |

Sumber : BPS, 2016

Tabel 12 : Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku di Wilayah Riau Daratan Tahun 2015-2020

| Kabupaten/Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kuantan Singingi | 10.236.686,28 | 11.120.243,39 | 12.270.812,40 | 13.670.940,43 | 15.299.074,43 | 17.321.693,29 |
| Indragiri Hulu | 12.183.996,84 | 13.267.466,10 | 14.673.385,07 | 16.408.792,69 | 18.482.725,42 | 21.086.095,35 |
| Kampar | 19.882.402,73 | 21.344.984,78 | 23.248.534,67 | 25.590.342,56 | 28.371.920,55 | 31.838.474,12 |
| Rokan Hulu | 5.473.808,41 | 5.985.150,90 | 6.590.197,81 | 7.290.063,49 | 8.084.816,85 | 9.018.637,33 |
| Pekanbaru | 65.952.279,63 | 72.704.628,42 | 81.145.633,75 | 91.315.733,66 | 103.247.461,87 | 117.898.448,75 |
| Riau Daratan | 113.729.173,90 | 124.422.473,58 | 137.928.563,70 | 154.275.872,83 | 173.485.999,13 | 197.163.348,83 |

Sumber : BPS, 2016

Perkembangan perubahan harga-harga yang terjadi akan turut mempengaruhi besarnya kebutuhan investasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 besarnya indeks implisit untuk investasi sebesar 127,50 dan diperkirakan meningkat menjadi sebesar 131,05 pada tahun 2015 dengan trend yang terjadi selama periode sebelumnya maka diperkirakan besarnya indeks implisit investasi pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 166,10. Selanjutnya dengan mempertimbangkan besarnya indeks implisit tersebut dapat ditentukan besarnya perkiraan kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi di wilayah Riau Daratan dengan mempertimbangkan perubahan harga-harga yang terjadi (inflasi) selama periode 2015-2020 diperkirakan sebesar Rp. 901.005,43 milyar, dimana pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 113.729,17 milyar dan terus meningkat menjadi sebesar Rp. 197.163.34 milyar di tahun 2020.

Kebutuhan investasi atas dasar harga berlaku di wilayah Riau Daratan pada tahun 2015 sebesar Rp. 113.729,17 milyar diharapkan berasal dari Kota Pekanbaru sebesar Rp. 65.962,28 milyar, Kabupaten Kampar sebesar Rp. 19.882,40 milyar, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 12.184,00 milyar, dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 5.473,81 milyar. Kemudian pada tahun 2020 kebutuhan investasi diperkirakan semakin besar yaitu Rp. 197.163,35 milyar, kebutuhan investasi tersebut diharapkan berasal dari Kota Pekanbaru sebesar Rp. 117.898,45 milyar, Kabupaten Kampar sebesar Rp. 31.838,47 milyar, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 21.086,10 milyar, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 17.321,69 milyar dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 9.018,64

milyar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tiga daerah dengan kegiatan investasi terbesar di wilayah Riau Daratan adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu. .
2. Daerah-daerah di wilayah Riau Daratan yang memiliki struktur ekonomi lebih mengarah pada sektor sekunder dan tersier cenderung memiliki angka *Capital Output Ratio* (COR) dan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang struktur ekonominya lebih didominasi oleh sektor primer.
3. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Riau Daratan selama tahun 2015-2020 rata-rata setiap tahunnya sebesar 6,03%. Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, maka dibutuhkan total investasi atas dasar harga konstan sebesar Rp. 599.865,00 milyar atau atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp. 901.005,43 milyar.

B. Saran

1. Struktur ekonomi daerah di wilayah Riau Daratan terus digesa untuk melakukan pergeseran dari sektor primer ke skunder dan tersier, guna meningkatkan nilai tambah.
2. Insentif terhadap para pengusaha dalam berinvestasi perlu untuk terus ditingkatkan, baik melalui perbaikan pelayanan perizinan, regulasi dan teknologi.
3. Kebutuhan investasi selama periode 2015-2020 diharapkan bersumber dari pemerintah, swasta (PMDN dan PMA) dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barika, 2012. Analysis Of Regional Disparities Regencies/Cities In The Province Of Bengkulu Year 2005 – 2009. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan* volume : 04. No. 03, Januari - Juni 2012 ISSN: 1979-7338.
- BPS dan Bappeda DIY, 2014. Analisis ICOR Sektorial Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2013.
- BPS dan Bappeda Situbondo, 2012. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR)* Tahun 2011.
- BPS Provinsi Riau, 2015. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010.
- Prasetyo, Eko P., 2008. The Quality Of Growth: Peran Teknologi Dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 18-31.
- Prishardoyo, Bambang, 2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005 . *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 1-8.
- Salim, Agus, 2010. Pengembangan Investasi Daerah: Agenda Pemerintah Daerah, diakses dari <http://agusjero.blogspot.com/2010/09/pengembangan-investasi-daerah-agenda.html>
- Sasana, Hadi, 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 32-40.
- Sebayang, Karolina Lesta, 2008. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal Sebagai *Political Proses* Dengan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 63-69.
- Shandra, Yosi, 2012. Konsumsi Dan Investasi Serta Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1, Nomor 1, April 2012
- Soesilowati, Etty, 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Terhadap Kemacetan Lalulintas Di Wilayah Pinggiran dan Kebijakan Yang Ditempuhnya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 9-17.
- Taryono dan Ekwarso, H., 2012. Analisis Pengeluaran Dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2008 dan 2009. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun II* No. 5, Maret 2012.
- Taryono dan Ekwarso, H., 2013. Analisis Ketersediaan Infrastruktur Di Pulau Sumatera. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun IV* No.10, November 2013 : 101 – 118.
- Taryono, 2012. Analisis Belanja Daerah Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Antara Kabupaten/Kota Penghasil Migas Dan Bukan Penghasil Di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun III* No. 7, November 2012 : 52 -70.